

Model Kolaboratif Penyaluran Bantuan Air Bersih dalam Memperkuat Ketahanan Masyarakat terhadap Krisis Air di Gunungkidul

^{*1} Mohammad Ishlahudin, ²Gufron Masduki

^{1,2} Sekolah Tinggi Agama Islam Yogyakarta, Indonesia

Corresponding Email: udinishlah2@gmail.com, cak.ghufron@gmail.com

Abstrak:

Krisis air bersih merupakan persoalan yang berulang di wilayah Gunungkidul dan membutuhkan respons yang melibatkan berbagai aktor pada tingkat lokal. Penelitian ini bertujuan menganalisis model kolaboratif penyaluran bantuan air bersih, kontribusinya terhadap ketahanan masyarakat, serta faktor pendukung dan penghambat penerapannya di Padukuhan Gandu, Kalurahan Semugih, Kapanewon Rongkop, Gunungkidul. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan desain studi kasus. Data diperoleh melalui dokumentasi kegiatan penyaluran bantuan air bersih yang melibatkan Komunitas Pisowan Gunungkidul dan Kelompok KKN 5 STAI Yogyakarta. Analisis dilakukan secara deskriptif dengan mengidentifikasi pola kolaborasi, mekanisme distribusi, kontribusi terhadap kapasitas respons masyarakat, serta faktor pendukung dan penghambat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model kolaboratif diwujudkan melalui keterlibatan multipihak dan distribusi bantuan pada titik tampungan masyarakat di RT 2, RT 3, RT 4, RT 5, dan RT 6. Model tersebut berkontribusi terutama pada penguatan kapasitas respons jangka pendek terhadap keterbatasan akses air. Faktor pendukung meliputi keterlibatan aktor dan keberadaan tampungan lokal, sedangkan keterbatasan koordinasi, dokumentasi, evaluasi, dan keberlanjutan bantuan menjadi tantangan. Penelitian berkontribusi memberikan kerangka awal pengembangan respons kolaboratif berbasis masyarakat untuk menghadapi krisis air secara berkelanjutan.

Keywords: Bantuan Air Bersih; Kolaborasi Masyarakat; Ketahanan Masyarakat; Krisis Air.

Global Journal of Interdisciplinary Studies and Research (GJISR)

Vol 1 Issue 1 2026

© 2026 The Authors. Published by Global Journal of Interdisciplinary Studies and Research (GJISR). This is an open-access article under the CC BY-SA license (<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).

Pendahuluan

Air bersih merupakan kebutuhan dasar yang memiliki keterkaitan langsung dengan kesehatan, kehidupan rumah tangga, dan keberlangsungan aktivitas sosial masyarakat. Organisasi Kesehatan Dunia menegaskan bahwa ketersediaan air yang aman dan mencukupi merupakan bagian penting dari kesehatan masyarakat serta hak setiap orang untuk memperoleh air yang cukup, berkelanjutan, aman, dapat diterima, mudah diakses, dan terjangkau. Dalam kerangka pembangunan berkelanjutan, pemenuhan akses air minum yang aman dan terjangkau juga menjadi bagian dari Sustainable Development Goal (SDG) 6. Persoalan ketersediaan air dengan demikian tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis penyediaan sumber daya, tetapi juga menyangkut kapasitas masyarakat dan kelembagaan lokal dalam merespons keterbatasan air secara berkelanjutan (World Health Organization, 2023).

Persoalan tersebut menjadi relevan dalam konteks Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, yang secara geografis banyak memiliki kawasan perbukitan karst dan menghadapi kerawanan kekeringan. Kajian Dewi et al. (2024) menunjukkan bahwa Gunungkidul secara umum memiliki tingkat kerawanan kekeringan yang tinggi, dengan kondisi geometeorologis dan karakteristik wilayah menjadi faktor yang berpengaruh terhadap kerentanan tersebut. Karakteristik kawasan karst juga menyebabkan

persoalan ketersediaan air memiliki dinamika tersendiri karena keberadaan air di bawah permukaan tidak selalu mudah dimanfaatkan oleh masyarakat. Cahyadi (2016) menunjukkan bahwa sumber air permukaan seperti telaga dan mata air memiliki arti penting bagi pemenuhan kebutuhan masyarakat di kawasan karst Gunungkidul. Kondisi tersebut menjadikan strategi pemenuhan kebutuhan air pada wilayah rawan kekeringan tidak cukup hanya mengandalkan ketersediaan sumber air lokal, tetapi juga membutuhkan pengelolaan dan mekanisme distribusi yang mampu menjangkau masyarakat ketika sumber air sulit diperoleh.

Sejumlah penelitian sebelumnya memperlihatkan bahwa respons terhadap persoalan air di Gunungkidul telah dilakukan melalui berbagai pendekatan berbasis masyarakat. Fatah et al. (2023), misalnya, menemukan bahwa keterlibatan lembaga swadaya masyarakat melalui pemberdayaan, pendampingan, penyediaan air bersih, dan edukasi dapat berkontribusi dalam penanggulangan kekeringan serta memperkuat ketahanan wilayah. Penelitian mengenai sistem penyediaan air berbasis masyarakat di Gunungkidul juga menunjukkan bahwa pengelolaan air yang melibatkan masyarakat dapat memberikan manfaat berupa pengurangan ketergantungan terhadap distribusi air tangki, penghematan pengeluaran rumah tangga, serta peningkatan akses dan konsumsi air bersih (Narotama, 2015). Temuan tersebut memperlihatkan pentingnya posisi masyarakat dan aktor nonpemerintah dalam menghadapi persoalan kekeringan. Namun, pendekatan penyediaan infrastruktur jangka panjang berbeda dengan intervensi bantuan air bersih sementara yang dilakukan secara langsung untuk merespons kebutuhan masyarakat pada kondisi krisis.

Dalam konteks tersebut, kolaborasi antarpihak menjadi aspek penting untuk dikaji karena penanganan krisis air pada tingkat komunitas tidak hanya bergantung pada satu aktor. Studi mengenai kelangkaan air bersih di wilayah pedesaan Indonesia menunjukkan bahwa masyarakat dapat membangun berbagai strategi adaptasi, tetapi keterbatasan infrastruktur dan sumber daya tetap membutuhkan dukungan kelembagaan yang lebih luas (Simanihuruk et al., 2025). Penelitian lain mengenai pengelolaan air berbasis pemberdayaan masyarakat juga menegaskan bahwa penguatan kapasitas komunitas dan dukungan teknologi dapat menjadi bagian dari upaya meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap keterbatasan air (Handono et al., 2024). Dengan demikian, kajian mengenai kolaborasi dalam distribusi bantuan air menjadi penting bukan hanya untuk melihat bagaimana bantuan disalurkan, tetapi juga untuk memahami hubungan antara aktor yang terlibat, mekanisme distribusi, keterlibatan masyarakat, serta peluang keberlanjutan intervensi.

Penelitian ini mengkaji model kolaboratif penyaluran bantuan air bersih dalam memperkuat ketahanan masyarakat terhadap krisis air di Gunungkidul. Fokus kajian diarahkan pada pelaksanaan penyaluran bantuan air bersih sementara yang dilakukan oleh Komunitas Pisowan Gunungkidul bersama Kelompok KKN 5 STAI Yogyakarta di Padukuhan Gandu, Kalurahan Semugih, Kapanewon Rongkop, Gunungkidul. Berdasarkan dokumentasi kegiatan, penyaluran dilakukan pada sejumlah tampungan masyarakat, antara lain RT 2, RT 3, RT 4, RT 5, dan RT 6. Kajian ini secara khusus menganalisis bagaimana kolaborasi tersebut dilaksanakan, bagaimana kontribusinya terhadap pemenuhan kebutuhan air masyarakat, serta faktor pendukung dan penghambat yang muncul dalam pelaksanaannya. Dengan fokus tersebut, penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran empiris mengenai praktik kolaboratif dalam respons terhadap krisis air pada tingkat komunitas sekaligus menjadi bahan pertimbangan bagi pengembangan strategi penanganan kekeringan yang lebih partisipatif dan berkelanjutan.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Pendekatan ini dipilih untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai pelaksanaan model kolaboratif dalam penyaluran bantuan air bersih sebagai respons terhadap krisis air pada tingkat masyarakat. Studi kasus digunakan karena penelitian berfokus pada satu peristiwa dan konteks tertentu, yaitu kegiatan penyaluran bantuan air bersih sementara di wilayah Gunungkidul. Creswell dan Poth (2018) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif digunakan untuk memahami makna, pengalaman, dan fenomena sosial berdasarkan perspektif partisipan serta konteks yang diteliti. Sementara itu, Yin (2018) menempatkan studi kasus sebagai strategi penelitian yang relevan untuk mengkaji fenomena kontemporer secara mendalam dalam konteks kehidupan nyata.

Dengan pendekatan tersebut, penelitian ini diarahkan untuk mendeskripsikan bentuk kolaborasi antarpihak, proses penyaluran bantuan, serta faktor-faktor yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan.

Lokasi penelitian berfokus pada Padukuhan Gandu, Kalurahan Semugih, Kapanewon Rongkop, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Data penelitian bersumber dari laporan kegiatan penyaluran bantuan air bersih sementara dan dokumentasi kegiatan yang merekam proses distribusi bantuan pada sejumlah titik tampungan masyarakat. Dokumentasi yang tersedia menunjukkan keterlibatan Komunitas Pisowan Gunungkidul dan Kelompok KKN 5 STAI Yogyakarta dalam kegiatan penyaluran air bersih pada beberapa wilayah RT. Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dan observasi terhadap rangkaian kegiatan yang terdokumentasi. Studi dokumentasi digunakan untuk menelaah informasi tertulis dan visual yang berkaitan dengan lokasi, aktor yang terlibat, serta pelaksanaan penyaluran bantuan. Bowen (2009) menjelaskan bahwa analisis dokumen merupakan prosedur sistematis untuk meninjau dan mengevaluasi dokumen sebagai sumber data penelitian kualitatif. Selanjutnya, dokumentasi visual diposisikan sebagai data pendukung untuk memperkuat deskripsi mengenai proses pelaksanaan kegiatan (Rose, 2016).

Data dianalisis secara deskriptif-kualitatif melalui proses pengorganisasian, kategorisasi, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Tahapan analisis dilakukan dengan mengidentifikasi informasi yang relevan dari laporan dan dokumentasi kegiatan, kemudian mengelompokkannya ke dalam tiga fokus penelitian, yaitu model kolaboratif penyaluran bantuan air bersih, kontribusi kegiatan terhadap pemenuhan kebutuhan masyarakat, serta faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan kegiatan. Proses analisis ini mengacu pada kerangka analisis data kualitatif yang menempatkan kondensasi data, penyajian data, dan penarikan serta verifikasi kesimpulan sebagai proses yang saling berkaitan (Miles et al., 2020). Untuk meningkatkan ketelitian interpretasi, informasi dari laporan tertulis dibandingkan dengan dokumentasi visual yang tersedia. Creswell dan Poth (2018) menekankan pentingnya penggunaan berbagai sumber data dalam penelitian kualitatif untuk membangun pemahaman yang lebih komprehensif terhadap fenomena yang dikaji.

Hasil dan Pembahasan

A. Model Kolaboratif Penyaluran Bantuan Air Bersih di Gunungkidul

Hasil penelitian menunjukkan bahwa model kolaboratif penyaluran bantuan air bersih dalam kegiatan ini dibangun melalui keterlibatan Komunitas Pisowan Gunungkidul dan Kelompok KKN 5 STAI Yogyakarta sebagai aktor yang hadir dalam pelaksanaan bantuan di Padukuhan Gandu, Kalurahan Semugih, Kapanewon Rongkop, Gunungkidul. Berdasarkan laporan kegiatan, program tersebut secara eksplisit merupakan penyaluran bantuan air bersih sementara, sehingga karakter intervensinya dapat dipahami sebagai respons langsung terhadap kebutuhan air masyarakat pada situasi keterbatasan. Dokumentasi kegiatan memperlihatkan bahwa distribusi tidak ditempatkan pada satu lokasi saja, tetapi diarahkan ke sejumlah titik tampungan masyarakat, yaitu RT 2, RT 3, RT 4, RT 5, dan RT 6. Pola tersebut menunjukkan adanya bentuk kolaborasi yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan secara langsung dan berbasis titik pelayanan masyarakat. Temuan ini sejalan dengan Hafidh et al. (2021) yang menunjukkan bahwa pengelolaan sumber daya air berbasis masyarakat membutuhkan keterlibatan aktor lokal karena persoalan air tidak hanya berkaitan dengan penyediaan sumber daya, tetapi juga dengan tata kelola pada tingkat komunitas.



Figure 1. Penyaluran air bersih di tampungan RT 2

Secara operasional, model yang terlihat dari dokumentasi dapat digambarkan sebagai kolaborasi distribusi berbasis komunitas, yaitu bantuan air disalurkan melalui kerja bersama aktor pelaksana menuju tampungan yang digunakan masyarakat. Keberadaan beberapa titik distribusi memperlihatkan bahwa pelaksanaan bantuan memperhatikan lokasi penerima manfaat pada tingkat lingkungan yang lebih dekat dengan masyarakat. Dokumentasi laporan secara khusus mencatat penyaluran pada tampungan RT 6, RT 2, tampungan umum RT 5, RT 3, dan RT 4. Pola distribusi semacam ini relevan dengan prinsip partisipasi masyarakat dalam pengelolaan air, karena akses terhadap air dalam komunitas tidak hanya ditentukan oleh keberadaan sumber air, tetapi juga oleh mekanisme sosial yang memungkinkan air tersebut sampai kepada pengguna. Penelitian mengenai partisipasi masyarakat dalam pengelolaan air di Indonesia menunjukkan bahwa hubungan sosial dan keterikatan antarmasyarakat dapat mendukung kemampuan komunitas untuk mengorganisasi sistem penyediaan air (Suhardiman et al., 2013). Dalam konteks Gunungkidul, kebutuhan terhadap mekanisme distribusi tersebut semakin relevan karena karakter wilayah karst berkaitan dengan kerawanan kekeringan dan keterbatasan akses terhadap air permukaan (Dewi et al., 2024; Nugroho et al., 2020).

Dari perspektif collaborative governance, keterlibatan lebih dari satu aktor dalam penyelenggaraan bantuan dapat dipahami sebagai bentuk kerja bersama untuk mencapai tujuan yang tidak sepenuhnya dapat dilaksanakan oleh satu pihak secara mandiri. Ansell dan Gash (2008) menjelaskan bahwa kolaborasi melibatkan aktor dari berbagai latar belakang dalam proses bersama untuk menangani persoalan publik, sedangkan Emerson et al. (2012) menempatkan prinsip keterlibatan bersama, motivasi bersama, dan kapasitas bertindak bersama sebagai unsur penting dalam rezim kolaboratif. Dalam kasus yang dikaji, data laporan secara empiris baru dapat memastikan keberadaan dua aktor utama, yaitu Komunitas Pisowan Gunungkidul dan Kelompok KKN 5 STAI Yogyakarta, serta adanya kegiatan distribusi pada beberapa titik tampungan. Dengan demikian, model kolaborasi yang dapat dirumuskan dari data adalah kolaborasi pelaksana–komunitas dengan orientasi distribusi, bukan model tata kelola air permanen. Pembagian tugas secara rinci, mekanisme pengambilan keputusan, pola koordinasi sebelum distribusi, maupun bentuk keterlibatan pemerintah setempat belum dijelaskan dalam laporan sehingga aspek tersebut tidak dapat disimpulkan lebih jauh tanpa data lapangan tambahan.

Model tersebut juga memperlihatkan bahwa penyaluran bantuan air tidak berhenti pada tindakan pengiriman air, tetapi menggunakan tampungan masyarakat sebagai titik akhir distribusi. Hal ini penting karena keberhasilan pelayanan air di wilayah pedesaan tidak hanya bergantung pada tersedianya air, tetapi juga pada kemampuan sistem lokal untuk memastikan air dapat diterima dan dimanfaatkan oleh masyarakat. Studi mengenai penyediaan air berbasis komunitas di Indonesia menunjukkan bahwa keberlanjutan sistem air sangat dipengaruhi oleh kapasitas kelembagaan dan pengelolaan pada tingkat lokal (Roekmi et al., 2018). Penelitian lain mengenai program penyediaan air pedesaan juga menemukan bahwa tingginya partisipasi masyarakat tidak dengan sendirinya menjamin keberfungsian sistem secara berkelanjutan; aspek kelembagaan, pembiayaan, dan pengelolaan tetap menjadi faktor penting (Putra, 2021; Kurniatin &

Maksum, 2022). Oleh karena itu, temuan pada kasus Gandu menunjukkan sebuah model respons jangka pendek berbasis kolaborasi dan titik tampungan, sementara keberlanjutan model tersebut memerlukan mekanisme pengelolaan lanjutan yang belum terdokumentasi dalam laporan.



Figure 2. Penyaluran bantuan air bersih pada tampungan umum RT 5

Dengan demikian, berdasarkan data yang tersedia, model kolaboratif penyaluran bantuan air bersih di Padukuhan Gandu dapat dirumuskan dalam tiga unsur utama, yaitu (1) keterlibatan aktor pelaksana, (2) distribusi bantuan secara langsung, dan (3) pemanfaatan tampungan masyarakat pada beberapa titik RT sebagai lokasi penerimaan air. Model ini dapat dipandang sebagai bentuk kapasitas adaptif komunitas dalam merespons keterbatasan air karena kemampuan menghadapi tekanan lingkungan juga berkaitan dengan kapasitas kolektif, jejaring sosial, dan kemampuan mengorganisasi sumber daya (Adger, 2003; Berkes & Ross, 2013). Namun, penting ditegaskan bahwa laporan belum menyediakan data untuk mengukur perubahan ketahanan masyarakat secara kuantitatif ataupun pengalaman warga setelah menerima bantuan. Karena itu, pada RQ1 temuan penelitian lebih tepat ditempatkan pada identifikasi dan karakterisasi model kolaborasi, sedangkan pembuktian mengenai dampaknya terhadap ketahanan masyarakat akan dibahas pada RQ2 setelah tersedia data pendukung.

B. Kontribusi Model Kolaboratif Penyaluran Bantuan Air Bersih terhadap Penguatan Ketahanan Masyarakat

Hasil penelitian menunjukkan bahwa model kolaboratif penyaluran bantuan air bersih memberikan kontribusi terhadap ketahanan masyarakat terutama melalui pemenuhan kebutuhan air secara langsung pada saat terjadi krisis air. Berdasarkan dokumentasi kegiatan, Komunitas Pisowan Gunungkidul bersama Kelompok KKN 5 STAI Yogyakarta menyalurkan bantuan air bersih di Padukuhan Gandu, Kalurahan Semugih, Kapanewon Rongkop, Gunungkidul, dengan distribusi dilakukan pada beberapa titik tampungan masyarakat, yaitu RT 2, RT 3, RT 4, RT 5, dan RT 6. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa bantuan tidak hanya berorientasi pada penyediaan air, tetapi juga pada upaya mempertahankan kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar ketika sumber air mengalami keterbatasan. Dalam perspektif ketahanan masyarakat, kemampuan memperoleh dan mempertahankan akses terhadap kebutuhan dasar merupakan salah satu unsur penting dalam menghadapi tekanan atau gangguan lingkungan. Penelitian Partelow (2021), misalnya, menunjukkan bahwa modal sosial dan hubungan antaranggota masyarakat dapat menjadi fondasi penting dalam membangun ketahanan komunitas ketika menghadapi gangguan.

Kontribusi berikutnya terlihat pada terbentuknya mekanisme respons kolektif terhadap krisis air. Penyaluran bantuan melalui kerja sama antara komunitas dan kelompok KKN memperlihatkan bahwa masyarakat tidak menghadapi persoalan air secara individual, melainkan memperoleh dukungan melalui tindakan bersama. Temuan ini sejalan dengan penelitian Wicaksono (2020) mengenai respons terhadap kekeringan Gunungkidul yang menunjukkan pentingnya jaringan antarorganisasi dalam pengelolaan kondisi darurat kekeringan. Studi tersebut memperlihatkan bahwa penanganan kekeringan melibatkan berbagai aktor dan hubungan jaringan yang berperan dalam respons bencana. Dalam konteks penelitian ini,

bentuk kolaborasi yang terdokumentasi memang lebih sederhana, tetapi memiliki prinsip yang serupa, yaitu menghubungkan sumber daya pihak yang memberikan bantuan dengan kebutuhan masyarakat pada tingkat lokal. Dengan demikian, kolaborasi dapat memperkuat kapasitas respons masyarakat karena bantuan diarahkan langsung pada titik-titik kebutuhan air.

Dari perspektif ketahanan, keberadaan titik tampungan masyarakat juga mempunyai arti penting karena memungkinkan bantuan yang telah disalurkan menjadi bagian dari mekanisme pemenuhan kebutuhan bersama. Dokumentasi menunjukkan adanya penyaluran pada tampungan RT 2, RT 3, RT 4, RT 5, dan RT 6. Model seperti ini memiliki kesesuaian dengan prinsip penyediaan air berbasis komunitas yang menempatkan masyarakat sebagai bagian penting dalam pengelolaan akses air. Roekmi et al. (2018) menunjukkan bahwa sistem penyediaan air berbasis komunitas dapat menjadi alternatif untuk meningkatkan akses air melalui partisipasi masyarakat. Namun, keberlanjutan sistem tersebut tidak hanya ditentukan oleh tersedianya air, melainkan juga oleh kelembagaan, pengelolaan sumber air, dan kualitas layanan. Hal tersebut diperkuat oleh Maryati et al. (2022) yang menemukan bahwa partisipasi masyarakat, kelembagaan yang terstruktur, dan sumber daya finansial merupakan faktor penting dalam keberlanjutan sistem penyediaan air terdesentralisasi. Oleh karena itu, dalam konteks penelitian ini, bantuan air dapat dipahami sebagai penguatan kapasitas respons masyarakat, sedangkan ketahanan jangka panjang memerlukan mekanisme pengelolaan yang lebih berkelanjutan.

Kontribusi model kolaboratif terhadap ketahanan masyarakat juga dapat dilihat dari kemampuannya mengurangi kerentanan masyarakat terhadap keterbatasan akses air dalam situasi krisis. Gunungkidul memiliki karakteristik wilayah yang rentan terhadap kekeringan; penelitian Dewi et al. (2024) menunjukkan bahwa Kabupaten Gunungkidul secara umum memiliki tingkat kerawanan kekeringan yang tinggi dan dipengaruhi antara lain oleh faktor curah hujan, jenis tanah, serta penggunaan lahan. Dalam kondisi demikian, bantuan air bersih berfungsi sebagai bentuk respons adaptif jangka pendek untuk mempertahankan akses masyarakat terhadap air ketika ketersediaan sumber air mengalami tekanan. Penelitian Fatah et al. (2023) mengenai penanggulangan kekeringan di Gunungkidul juga menunjukkan bahwa bantuan fisik air bersih yang disertai pemberdayaan dan pendampingan masyarakat dapat berkontribusi terhadap upaya menjaga ketahanan masyarakat/wilayah. Sementara itu, Assalimi dan Yuanjaya (2023) menunjukkan bahwa tindakan kolektif masyarakat Gunungkidul dalam menghadapi kekeringan dibangun melalui kepentingan bersama, organisasi, mobilisasi, dan peluang. Temuan tersebut memperkuat argumentasi bahwa respons terhadap krisis air tidak hanya berkaitan dengan jumlah air yang tersedia, tetapi juga dengan kemampuan aktor dan masyarakat untuk melakukan tindakan kolektif.

Meskipun demikian, kontribusi terhadap ketahanan masyarakat dalam penelitian ini perlu dipahami secara proporsional. Dokumentasi yang tersedia membuktikan adanya penyaluran bantuan air pada sejumlah titik tampungan masyarakat, tetapi belum menyediakan data kuantitatif mengenai perubahan kondisi masyarakat sebelum dan sesudah bantuan, seperti durasi kecukupan air, jumlah rumah tangga penerima, pengurangan jarak pengambilan air, penghematan biaya, atau perubahan kemampuan masyarakat menghadapi musim kemarau berikutnya. Karena itu, penelitian ini belum dapat menyimpulkan bahwa bantuan tersebut secara langsung meningkatkan ketahanan masyarakat dalam jangka panjang. Temuan yang lebih kuat adalah bahwa model kolaboratif tersebut berkontribusi pada penguatan kapasitas respons masyarakat secara jangka pendek, khususnya melalui peningkatan akses terhadap air pada saat krisis. Kesimpulan tersebut sejalan dengan penelitian Putra (2021) yang menegaskan bahwa keberlanjutan penyediaan air berbasis masyarakat dipengaruhi oleh berbagai aspek, termasuk kelembagaan dan kemampuan pengelolaan setelah program berlangsung. Kurniatin dan Maksum (2022) juga menunjukkan bahwa keberlanjutan layanan air berbasis masyarakat menghadapi persoalan ketika dukungan sumber daya dan kapasitas pengelolaan pascaprogram terbatas. Dengan demikian, model kolaboratif penyaluran bantuan air dalam penelitian ini dapat diposisikan sebagai mekanisme respons dan penguatan kapasitas awal, sementara penguatan ketahanan air jangka panjang membutuhkan kesinambungan pengelolaan sumber air, kelembagaan masyarakat, dan dukungan lintas aktor.

C. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Penerapan Model Kolaboratif Penyaluran Bantuan Air Bersih

Penerapan model kolaboratif dalam penyaluran bantuan air bersih di Padukuhan Gandu didukung oleh keterlibatan lebih dari satu aktor dalam merespons kebutuhan masyarakat. Laporan dokumentasi menunjukkan adanya keterlibatan Komunitas Pisowan Gunungkidul dan Kelompok KKN 5 STAI Yogyakarta dalam penyaluran bantuan air bersih di Padukuhan Gandu, Kalurahan Semugih, Kapanewon Rongkop, Gunungkidul. Bantuan tersebut disalurkan melalui beberapa titik tampungan masyarakat, yaitu RT 2, RT 3, RT 4, RT 5, dan RT 6. Keberadaan aktor yang saling melengkapi menjadi modal penting dalam pelaksanaan respons terhadap krisis air, karena keterbatasan sumber daya pada satu pihak dapat ditopang oleh sumber daya pihak lainnya. Dalam konteks penanggulangan kekeringan di Gunungkidul, Wicaksono (2020) menunjukkan bahwa respons terhadap bencana kekeringan melibatkan jaringan antarorganisasi dan berbagai pemangku kepentingan. Dengan demikian, keterlibatan multipihak menjadi salah satu faktor yang mendukung terlaksananya distribusi bantuan air secara langsung kepada masyarakat.

Faktor pendukung berikutnya adalah penggunaan tampungan masyarakat sebagai titik penyaluran bantuan. Berdasarkan dokumentasi, air bersih tidak hanya disalurkan pada satu lokasi, tetapi ditempatkan pada beberapa tampungan yang tersebar di wilayah RT 2, RT 3, RT 4, RT 5, dan RT 6. Pola tersebut memungkinkan bantuan diarahkan pada titik yang dekat dengan komunitas penerima sehingga distribusi dapat menyesuaikan dengan struktur permukiman yang telah tersedia. Penggunaan fasilitas atau mekanisme berbasis komunitas memiliki relevansi dengan penelitian Roekmi, Baskaran, dan Chua (2018), yang menunjukkan bahwa penyediaan air berbasis komunitas dapat menjadi alternatif untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap air melalui partisipasi lokal. Maryati et al. (2022) juga menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dan kelembagaan merupakan faktor penting dalam keberlanjutan sistem penyediaan air berbasis desentralisasi. Dalam konteks penelitian ini, keberadaan tampungan pada tingkat RT dapat dipandang sebagai infrastruktur sosial-lokal yang membantu proses distribusi bantuan, meskipun laporan belum menyediakan informasi mengenai mekanisme pengelolaan tampungan setelah bantuan disalurkan.

Di sisi lain, terdapat sejumlah faktor penghambat yang perlu diperhatikan, terutama berkaitan dengan belum terdokumentasikannya mekanisme koordinasi dan pembagian peran secara rinci. Laporan yang menjadi sumber data penelitian mendokumentasikan kegiatan penyaluran dan lokasi tampungan, tetapi tidak menjelaskan secara spesifik siapa yang bertanggung jawab atas pengadaan air, transportasi, penentuan jumlah bantuan, pengaturan jadwal distribusi, maupun koordinasi dengan pemerintah atau pengelola masyarakat setempat. Kondisi tersebut menjadi penting karena keberhasilan model kolaboratif tidak hanya ditentukan oleh keberadaan banyak aktor, tetapi juga oleh kejelasan pengaturan kelembagaan dan mekanisme koordinasi. Penelitian Wicaksono (2020) mengenai respons kekeringan di Gunungkidul menunjukkan pentingnya jaringan antarorganisasi dalam pengelolaan kondisi darurat, sedangkan Willetts et al. (2020) menekankan bahwa pengelolaan layanan berbasis komunitas memerlukan pengaturan tanggung jawab antara pemerintah dan komunitas agar keberlanjutan layanan dapat dipertahankan. Oleh karena itu, keterbatasan dokumentasi mengenai struktur koordinasi menjadi salah satu celah yang perlu diperhatikan dalam pengembangan model kolaboratif.

Faktor penghambat lainnya berkaitan dengan keberlanjutan bantuan setelah kegiatan distribusi selesai. Karakter kegiatan yang terdokumentasi dalam laporan merupakan penyaluran bantuan air bersih sementara, sehingga belum dapat diketahui apakah terdapat mekanisme penyediaan air lanjutan apabila krisis berlangsung lebih lama. Keberlanjutan juga berkaitan dengan ketersediaan sumber daya, pembiayaan distribusi, pengelolaan tampungan, kualitas air, serta kelembagaan lokal yang bertanggung jawab setelah kegiatan bantuan berakhir. Roekmi et al. (2018) menemukan bahwa sistem penyediaan air berbasis komunitas menghadapi persoalan kelembagaan, kualitas air, dan keberlanjutan sumber daya apabila aspek-aspek tersebut tidak dikelola secara memadai. Temuan Maryati et al. (2022) juga menunjukkan bahwa organisasi yang terstruktur, partisipasi masyarakat, dan sumber daya finansial merupakan faktor penting bagi keberlanjutan sistem penyediaan air. Dengan demikian, dalam kasus Padukuhan Gandu, keberhasilan distribusi jangka pendek belum secara otomatis menunjukkan adanya keberlanjutan sistem penyediaan air dalam jangka panjang.

Secara keseluruhan, faktor pendukung utama model kolaboratif dalam penelitian ini dapat diidentifikasi pada keterlibatan multipihak, adanya titik tampungan masyarakat, serta kemampuan menyalurkan bantuan secara langsung ke beberapa wilayah RT. Sementara itu, faktor penghambat yang perlu menjadi perhatian

adalah belum terdokumentasikannya pembagian peran, mekanisme koordinasi, keberlanjutan sumber daya, pengelolaan setelah distribusi, dan sistem evaluasi dampak bantuan. Kesimpulan tersebut perlu ditempatkan secara proporsional karena laporan kegiatan belum memuat data wawancara, jumlah penerima manfaat, volume air yang disalurkan, frekuensi distribusi, durasi ketersediaan air, maupun evaluasi masyarakat terhadap bantuan. Oleh sebab itu, temuan RQ 3 lebih tepat dipahami sebagai pemetaan faktor pendukung dan potensi hambatan dalam pelaksanaan model, bukan sebagai pengukuran empiris mengenai tingkat keberhasilan masing-masing faktor. Penguatan model ke depan dapat diarahkan pada pembentukan pembagian peran yang lebih jelas, mekanisme koordinasi antarpihak, pencatatan distribusi, evaluasi kebutuhan masyarakat, serta strategi keberlanjutan ketika kondisi krisis air berlangsung dalam periode yang lebih panjang.

Kesimpulan

Temuan penelitian menunjukkan bahwa model kolaboratif penyaluran bantuan air bersih di Padukuhan Gandu tidak hanya memperlihatkan keterlibatan Komunitas Pisowan Gunungkidul dan Kelompok KKN 5 STAI Yogyakarta, tetapi juga menunjukkan hal yang cukup mengagetkan: ketahanan masyarakat dalam menghadapi krisis air dapat diperkuat melalui mekanisme respons sederhana yang bertumpu pada jaringan lokal dan titik tampungan masyarakat. Penyaluran bantuan dilakukan pada beberapa titik RT, yaitu RT 2, RT 3, RT 4, RT 5, dan RT 6, sehingga model kolaborasi berfungsi sebagai mekanisme respons langsung terhadap kebutuhan air bersih. Temuan ini memperlihatkan bahwa kolaborasi tidak selalu harus diwujudkan melalui struktur kelembagaan yang kompleks, tetapi dapat dimulai dari keterhubungan aktor, sumber daya, dan kebutuhan masyarakat pada tingkat lokal. Kontribusi penelitian terletak pada pemahaman bahwa praktik penyaluran bantuan air bersih berbasis kolaborasi dapat diposisikan sebagai bagian dari penguatan kapasitas respons masyarakat terhadap krisis air.

Namun demikian, penelitian ini memiliki keterbatasan karena sumber data utama berupa dokumentasi kegiatan sehingga belum mencakup wawancara dengan masyarakat, pengelola tampungan, maupun aktor yang terlibat dalam proses kolaborasi. Penelitian juga belum memiliki data mengenai jumlah penerima manfaat, volume air yang disalurkan, frekuensi distribusi, durasi ketersediaan air, serta perubahan kondisi masyarakat sebelum dan sesudah bantuan. Oleh karena itu, penelitian ini belum dapat membuktikan peningkatan ketahanan masyarakat dalam perspektif jangka panjang, melainkan menunjukkan kontribusi pada kapasitas respons jangka pendek. Keterbatasan tersebut sekaligus membuka ruang bagi penelitian berikutnya untuk mengembangkan model evaluasi yang menggabungkan data kuantitatif dan kualitatif, termasuk pengukuran akses air, keberlanjutan distribusi, partisipasi masyarakat, efektivitas koordinasi, dan keberlanjutan kelembagaan. Dengan demikian, penelitian ini berkontribusi sebagai pijakan awal untuk memahami bagaimana praktik kolaboratif lokal dapat dikembangkan dari respons bantuan sementara menuju mekanisme ketahanan masyarakat yang lebih berkelanjutan.

References

- Adger, W. N. (2003). Social capital, collective action, and adaptation to climate change. *Economic Geography*, 79(4), 387–404. <https://doi.org/10.1111/j.1944-8287.2003.tb00220.x>
- Andriyanto, N., Suheri, A., & Soesanta, P. E. (2023). Analysis of the sustainability status of community-based drinking water supply in Kapongan District, East Java. *Indonesian Journal of Applied Environmental Studies*.
- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571. <https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>
- Assalimi, F. A., & Yuanjaya, P. (2023). Collective action Komunitas Resan Gunungkidul dalam mengatasi kekeringan di Kabupaten Gunungkidul. *Journal of Public Policy and Administration Research*, 8(6).
- Berkes, F., & Ross, H. (2013). Community resilience: Toward an integrated approach. *Society & Natural Resources*, 26(1), 5–20. <https://doi.org/10.1080/08941920.2012.736605>
- Bowen, G. A. (2009). Document analysis as a qualitative research method. *Qualitative Research Journal*, 9(2), 27–40. <https://doi.org/10.3316/QRJ0902027>

- Cahyadi, A. (2016). Peran telaga dalam pemenuhan kebutuhan air kawasan karst Gunungsewu pasca pembangunan jaringan air bersih. *Geomedia: Majalah Ilmiah dan Informasi Kegeografian*, 14(2). <https://doi.org/10.21831/gm.v14i2.13813>
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Dewi, L. W. P., Sulastri, N. N., Ngadisih, & Sucipta, I. N. (2024). Kajian kerawanan bencana kekeringan di Kabupaten Gunungkidul di Yogyakarta, Indonesia. *Jurnal BETA (Biosistem dan Teknik Pertanian)*, 12(1), 1–12. <https://doi.org/10.24843/JBETA.2024.v12.i01.p01>
- Emerson, K., Nabatchi, T., & Balogh, S. (2012). An integrative framework for collaborative governance. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 22(1), 1–29. <https://doi.org/10.1093/jopart/mur011>
- Fatah, A., Ulum, M., & Bowo, T. A. (2023). Peran LSM dalam penanggulangan kekeringan dan implikasinya bagi ketahanan wilayah di Kapanewon Nglipar Gunungkidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Studi pada Yayasan Wahana Mandiri Indonesia). *Jurnal Ketahanan Nasional*, 29(1), 108–120.
- Hafidh, R. A., Widianingsih, I., & Buchari, A. (2021). The practice of community-based water resource management in rural Indonesia. *Journal of Governance*, 6(2).
- Handono, S. Y., Wibisono, Y., Nugroho, W. A., & Arif, C. (2024). Integrating social empowerment and membrane technology for clean water access in a rural Indonesian community case study in Nganti Village, Bojonegoro. *Jurnal AGRISEP: Kajian Masalah Sosial Ekonomi Pertanian dan Agribisnis*, 24(2), 633–660. <https://doi.org/10.31186/jagrisep.24.02.633-660>
- Kurniatin, P. R. E., & Maksum, I. R. (2022). Sustainable strategy for community-based drinking water supply (PAMSIMAS) post program in rural Indonesia. *Journal of Governance and Public Policy*, 9(3). <https://doi.org/10.18196/jgpp.v9i3.14629>
- Maryati, S., Firman, T., & Humaira, A. N. S. (2022). A sustainability assessment of decentralized water supply systems in Bandung City, Indonesia. *Utilities Policy*, 76, 101373. <https://doi.org/10.1016/j.jup.2022.101373>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2020). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (4th ed.). SAGE Publications.
- Narotama, M. R. (2015). *Provision and utilization of community water system in drought prone area: A study case of Gunungkidul Regency* [Master's thesis, Universitas Gadjah Mada]. UGM Repository.
- Nugroho, J., Zid, M., & Miarsyah, M. (2020). Potensi sumber air dan kearifan masyarakat dalam menghadapi risiko kekeringan di wilayah karst (Kabupaten Gunung Kidul, Provinsi Yogyakarta). *Jurnal Pengelolaan Lingkungan Berkelanjutan*, 4(1), 438–447. <https://doi.org/10.36813/jplb.4.1.438-447>
- Partelow, S. (2021). Social capital and community disaster resilience: Post-earthquake tourism recovery on Gili Trawangan, Indonesia. *Sustainability Science*, 16, 203–220. <https://doi.org/10.1007/s11625-020-00854-2>
- Putra, R. E. (2021). Sustainability analysis of community-based rural water supply (RWS): Case study PAMSIMAS program in Ponggang Village and Talagasari Village, Subang District, West Java Province. *Jurnal Teknik Lingkungan*, 27(2). <https://doi.org/10.5614/j.tl.2021.27.2.5>
- Roekmi, R. A. K., Baskaran, K., & Chua, L. H. C. (2018). Community-based water supplies in Cikarang, Indonesia: Are they sustainable? *Natural Resources Forum*, 42(2), 108–122. <https://doi.org/10.1111/1477-8947.12146>
- Rose, G. (2016). *Visual methodologies: An introduction to researching with visual materials* (4th ed.). SAGE Publications.
- Simanihuruk, M., Sitorus, H., Ismail, R., Sitanggang, T., & Sihotang, D. (2025). Community resilience and adaptive strategies for clean water scarcity in Salaon Toba Village, Lake Toba, Indonesia. *Sustainability*, 17(22), 10335. <https://doi.org/10.3390/su172210335>
- Soetanto, R., Hermawan, F., Drosou, N., Boshier, L., & Hatmoko, J. U. D. (2022). Perceptions of social responsibility for community resilience to flooding: A comparison between communities in Indonesia and the UK. *Water*, 14(3), 433. <https://doi.org/10.3390/w14030433>

- Wicaksono, A. (2020). Examining inter-organizational network during emergency response of Gunungkidul drought 2019. *Policy & Governance Review*, 4(3). <https://doi.org/10.30589/pgr.v4i3.354>
- Willets, J., Mills, F., & Al'Afghani, M. M. (2020). Sustaining community-scale sanitation services: Co-management by local government and low-income communities in Indonesia. *Frontiers in Environmental Science*, 8, 98. <https://doi.org/10.3389/fenvs.2020.00098>
- World Health Organization. (2023). *Drinking-water*. [World Health Organization](https://www.who.int/publications-detail/9789240048886)
- Yin, R. K. (2018). *Case study research and applications: Design and methods* (6th ed.). SAGE Publications.